

MENYINGKAP TABIR PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH DI TENGAH GELIAT SERTIFIKASI

MISRAN RAHMAN

PENDAHULUAN

Pegawai negeri sipil (PNS) merupakan pekerjaan yang diidolakan serta didam-idamkan oleh sebagian besar masyarakat khususnya masyarakat Gorontalo. Menurut pandangan masyarakat bahwa hanya dengan PNS maka seseorang dapat hidup layak dan sejahtera. Oleh adanya pandangan tersebut maka masyarakat Gorontalo terutama orangtua angkatan kerja berupaya dengan segala daya agar anaknya menjadi PNS. Upaya yang dilakukan tersebut bahkan sampai bersedia menyuapkan uang dengan nominal tertentu yang tidak sedikit kepada pihak tertentu asalkan anak-anak mereka menjadi PNS. Bahkan terkesan pasaran “suap menyuap” itu sesuai dengan tingkatan Ijazah terakhir yang dimiliki dan Instansi tertentu.

Paradigm masyarakat tersebut diperkuat lagi dengan adanya kebijakan pemerintah tentang sertifikasi pendidik bagi guru dan dosen, Sertifikasi merupakan pengakuan dan penghargaan terhadap kinerja dan profesionalitas seorang guru dan dosen dalam melaksanakan tugas pokoknya. Sasaran sertifikasi adalah guru pada pendidikan formal dan guru TK/PAUD. Demikian pula para dosen pada Perguruan Tinggi. Imbas dari pengakuan dan penghargaan adalah pemberian tunjangan satu kali gaji pokok bagi pendidik yang tersertifikasi. Oleh adanya kebijakan ini maka para warga masyarakat terutama para orangtua angkatan kerja berupaya agar anaknya diterima di Perguruan Tinggi yang menghasilkan output untuk menjadi guru ataupun dosen. Sasaran dari para orangtua adalah jurusan pada Perguruan Tinggi Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) yang menghasilkan guru pada pendidikan formal seperti guru SD, SMP, SMA/SMK termasuk guru PAUD. Sementara itu untuk jurusan yang menghasilkan jenis pendidik pada masyarakat dalam hal ini jurusan Pendidikan Luar Sekolah (PLS) mulai ditinggalkan..

Meskipun ada kebijakan moratorium yang dikeluarkan pemerintah terhadap PNS, dimana adanya penundaan penerimaan PNS, namun tidak menyurutkan animo masyarakat untuk menjadi PNS. Sebetulnya meskipun pemerintah tidak mengeluarkan kebijakan tentang moratorium namun rasio antara kuota PNS tidak sebanding dengan output peluang untuk menjadi PNS makin hari makin kecil. Akibatnya angka pengangguran makin meningkat. Namun demikian masyarakat seolah tidak mau peduli. Berjubelnya para alumni untuk melamar menjadi PNS pada setiap adanya penerimaan PNS merupakan bukti bahwa animo terhadap PNS tetap masih tinggi.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat bahwa PNS bukanlah satu-satunya lapangan kerja yang dapat menjamin untuk memperoleh kehidupan yang layak. Demikian pula lembaga pendidikan formal bukanlah satu-satunya jalur pendidikan yang dapat menjamin alumninya memperoleh pekerjaan yang layak. Pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh dari pendidikan formal masih perlu dilengkapi dengan jalur pendidikan lain yaitu jalur pendidikan nonformal. Bahkan pendidikan nonformal tidak saja sebatas pelengkap pendidikan formal, bahkan dapat pula berperan sebagai pengganti pendidikan formal.

METODE PEMBAHASAN

Pembahasan dalam tulisan ini menggunakan analisis konseptual yang didasarkan pada hasil bacaan, pengalaman, wawancara dan survey terbatas yang diasumsikan dapat memberikan informasi singkat tentang konsep pendidikan nonformal serta solusi terhadap permasalahan pada pendidikan nonformal.

PEMBAHASAN

Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh sebagian besar masyarakat Gorontalo merupakan suatu lapangan pekerjaan yang didam-idamkan. Oleh karena itu adanya kebijakan moratorium yang dilakukan oleh Pemerintah terhadap PNS ikut mengguncang masyarakat terutama para angkatan kerja dan masyarakat yang mengidolakan PNS. Moratorium dilakukan oleh karena adanya ketidakseimbangan antara jumlah PNS dengan volume pekerjaan mereka. Selain itu kebijakan moratorium juga disebabkan oleh distribusi tenaga PNS yang tidak

merata. Moratorium ini bagi masyarakat merupakan pukulan bagi masyarakat. Betapa tidak, dengan ditundanya penerimaan PNS tersebut maka semakin banyak angkatan kerja yang harus bersaing dari tahun ke tahun untuk memperebutkan kursi PNS, sementara kuota PNS setiap tahun sangat terbatas. Di samping itu, sekolah menengah dan perguruan tinggi sebagai lembaga pada jalur pendidikan formal, setiap tahunnya meluluskan alumni yang jumlahnya lebih besar dari pada kuota PNS. Adanya ketidakseimbangan antara kuota PNS dengan lulusan Sekolah Menengah dan Perguruan Tinggi maka jumlah angkatan kerja yang tidak tertampung sebagai PNS setiap tahun semakin besar. Akibatnya, angka pengangguran meningkat dan dengan sendirinya angka kemiskinan ikut meningkat..

Berdasarkan fenomena di atas, ternyata untuk menjadi PNS peluangnya semakin kecil. Sehingga para angkatan kerja dan masyarakat pada umumnya perlu merobah paradig bahwa PNS bukanlah satu-satunya lapangan kerja yang dapat menjamin masyarakat khususnya angkatan kerja untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Masih ada pekerjaan lain di luar PNS yang juga mampu memberikan jaminan penghidupan yang layak, misalnya wirausaha. Dengan demikian masyarakat juga diharapkan mulai meninggalkan paradig bahwa hanya melalui pendidikan formal masyarakat dijamin memperoleh penghidupan yang layak. Masih ada jalur lain yaitu jalur pendidikan nonformal atau lebih dikenal dengan pendidikan luar sekolah. .

Pandangan masyarakat tentang pendidikan luar sekolah sampai saat ini belum begitu populer. Banyak orang yang belum tahu tentang program pendidikan luar sekolah tersebut. Ada sebagian masyarakat bahwa PLS sesuatu yang misterius. Masyarakat lebih mengenal pendidikan formal, oleh karena persyaratan kualifikasi akademik menuntut adanya sertifikat (ijazah) formal. Pandangan ini dari dulu sampai sekarang belum banyak berubah. Fordlan tahun 1993 (dalam Marzuki, 2009: 3) mengemukakan bahwa: “pada tahun 1970-an salah satu ciri yang terkait dengan pendidikan nonformal adalah relevan dengan kelompok yang kurang beruntung. Sampai saat ini pun sasaran dari pendidikan nonformal adalah masyarakat yang termarginalkan seperti miskin yang kurang mampu mengikuti

pendidikan formal (putus sekolah) termasuk masyarakat yang kurang mampu untuk melanjutkan pendidikan di bangku sekolah.

Paradigma ini merembes pula pada pendidik pada pendidik-an nonformal. Selama ini pendidik nonformal sulit untuk Sertifikasi merupakan bukti penghargaan dan pengakuan terhadap profesionalisasi suatu pekerjaan. Khusus untuk guru, regulasi tentang sertifikasi tercantum dalam Undang-undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen pasal 1 butir 11 dikemukakan bahwa: Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat pendidik untuk guru dan dosen. Selanjutnya dalam pasal yang sama butir 12 dikemukakan bahwa: Sertifikat pendidik adalah bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional.

Adanya sertifikasi ini menimbulkan kecemburuan sosial bagi pendidik bagi pendidik formal dan Moratorium Pegawai Negeri Sipil (PNS) merupakan dua issue yang ini hangat dibicarakan di kalangan masyarakat. Sertifikasi didefinisikan sebagai proses pemberian tunjangan untuk guru dan dosen atau bukti formal sebagai pengakuan yang diberikan kepada guru dan dosen sebagai tenaga profesional. (Yamin, 2006; 2). Selanjutnya dengan adanya sertifikasi guru/dosen memperoleh tunjangan sertifikasi sebesar gaji pokok. Oleh karena itu sertifikasi menjadi dambaan bagi setiap pendidik sebagai PNS bahkan menjadi motivasi bagi mereka yang mau mengikuti jenjang S1.

Fenomena ini menjadi tugas berat bagi para ilmuwan dan praktisi PLS, Sebetulnya jika setiap orang memahami program PLS dan mampu mengimplementasikannya maka orang tersebut tidak perlu mencari pekerjaan, malah justru diharapkan mampu untuk menciptakan lapangan pekerjaan. Orang PLS adalah orang yang mampu mendayagunakan peluang. Hal ini merupakan suatu pola dan tatanan kehidupan yang lebih baik karena dapat mengembangkan diri dan meningkatkan kemandirian. Konsep PLS adalah konsep pemberdayaan yang mempunyai makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar terhadap kekuatan-kekuatan yang ada dari segala bidang. Namun hal ini perlu didukung oleh kreativitas, keuletan dan keteguhan

yang bersangkutan. Oleh karena itu dibutuhkan upaya-upaya untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat agar program pendidikan luar sekolah dapat tersosialisasikan

Dalam Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pendidikan nonformal menempati kedudukan yang cukup strategis. Pendidikan nonformal sebagai bagian dari Pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan jalur pendidikan yang dapat berperan sebagai suplemen dan komplemen dari pendidikan formal. Dalam pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa: “Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat”.

Pendidikan luar sekolah sebagai suplemen pendidikan formal artinya pendidikan luar sekolah sebagai pemnambah dan pelengkap pendidikan formal. Tanpa dilengkapi dan ditambah dengan pendidikan nonformal sulit mengim-
plementasikan ilmu yang diperoleh dari pendidikan formal. Hal ini terjadi pada pelatihan tambahan bagi alumni pendidikan formal dalam rangka melaksanakan tugasnya di lapangan. Sebagai komplemen jalur pendidikan luar sekolah dapat menggantikan pendidikan formal dalam rangka mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Selanjutnya jenis-jenis dari pendidikan nonformal sesuai undang-undang nomor 20 tahun 2003 di atas meliputi: pendidikan kecakapan hidup, pendidikan anak usia dini, pendidikan kepemudaan, pendidikan pemberdayaan perempuan, pendidikan keaksaraan, pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja, pendidikan kesetaraan, serta pendidikan lain yang ditujukan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik

A. Kesimpulan

1. Pendidikan Luar sekolah secara umum belum dipahami oleh masyarakat luas. Itulah sebabnya animo masyarakat untuk memilih jurusan PLS rendah.

Beberapa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah mahasiswa jurusan PLS, yaitu: (i) melakukan sosialisasi tentang konsep dan program PLS, (ii) melaksanakan pelatihan singkat (iii) memberdayakan alumni, (iv) memberdayakan mahasiswa, (v) menyelenggarakan seminar tentang kewirausahaan, dan (vi) menggunakan media massa